

Tata Kelola Pemerintahan Berbasis *Electronic Government* pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu

Iman Surya¹, Yusi Remon^{1*}, Indira Reisia Angun¹, Yuliana¹, Willibrordus Himang¹

¹Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

*Email Korespondensi: reymalakh@gmail.com

Abstract

Mahakam Ulu is a new Regency that was established independently in 2012 apart from West Kutai Regency. This research aims to determine the impact of technology in government agencies which is a challenge that must be overcome by Mahakam Ulu Regency in implementing Electronic Government in the Personnel and Human Resources Development Agency. The need for the use of e-Gov itself has developed from year to year, the Mahakam Ulu Regency government is required to be able to work hard and be proactive in dealing with current developments with the use of modern technology. This research method uses qualitative research, which is research that describes all research events that occur in the field using literature studies. The research results show that the implementation of e-Gov cannot still be said to be optimal because it is still experiencing delays in adapting to the existing technological conditions at BKPSDM Mahakam Ulu Regency: First, employee performance is always increasing, but on a digital document basis, report documents are still often delayed. Second, human resource factors (disposition) or government officials still have difficulty absorbing updated information related to the implementation of e-Gov, so special guidance is needed to be able to survive with the aim of good governance.

Keywords: *Government Governance, Electronic Government*

Abstrak

Mahakam Ulu merupakan Kabupaten baru yang berdiri sendiri pada tahun 2012 terlepas dari Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak teknologi di instansi pemerintahan menjadi tantangan yang harus di lalui oleh Kabupten Mahakam Ulu dalam penerapan *Electronic Government* di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebutuhan penggunaan e-Gov sendiri mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, pemerintah Kabupetan Mahakam Ulu di tuntutan untuk bisa berkerja keras dan proaktif dalam menangani perkembangan zaman dengan penggunaan teknologi modern. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualiatatif merupakan penelitian yang mempaparkan segala peristiwa penelitian yang terjadi di lapangan dengan batuan studi literature. Hasil Penelitian menunjukkan penerpan e-Gov masih belum bisa dikatakan optimal karena masih mengalami keterlambatan penyesuaian dengan kondisi teknologi yang ada di BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu : Pertama, Kinerja pegawai selalu mengalami peningkatan tetapi secara basis digital document masih sering mengalami keterlambatan dokumen laporan. Kedua, Faktor sumber daya manusia (disposisi) ataupun aparat pemerintahnya masih

kesulitan menyerap informasi pembaruan terkait penerapan e-Gov sehingga diperlukan bimbingan khusus agar bisa survive dengan tujuan good governance.

Kata kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Electronic Government

Pendahuluan

Collaborative Governance sebagai paradigma baru yang digunakan menghadapi isu yang beragam dalam masyarakat yang kompleks, paradigma yang dimaksud prinsip dasarnya adalah adanya kesetaraan hubungan diantara pemangku kepentingan di sector public, swasta dan masyarakat (Surya, Nofrima, et al., 2021). Perkembangan teknologi atau dikenal dengan revolusi 4.0 memancing banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia. Salah satu keunggulan adanya TIK adalah dapat memudahkan pengumpulan informasi dan persebaran data secara cepat (Fahlevy et al., 2023). Munculnya digitalisasi menghasilkan dampak teknologi di masyarakat yang mempengaruhi kegiatan sehari-hari dalam lingkungan sekitar yang menunjukkan trend global terkini. Hampir semua sektor aktifitas manusia bersentuhan dengan teknologi digital (Sudrartono et al., 2023). Melalui teknologi informasi (TI) berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang tujuannya mengoptimalkan pelayanan public secara praktis dan efisien sehingga mewujudkan kualitas pemerintahan yang baik.

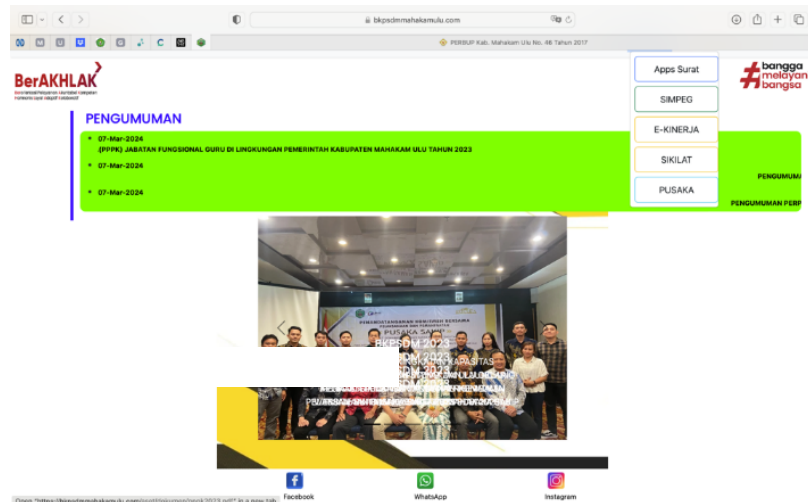
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah dapat menciptakan pelayanan public yang memenuhi kriteria *better, cheaper and faster* senada dengan peraturan yang dikeluarkan yaitu Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah pasal 4 tentang informasi di lingkungan pemerintahan daerah bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi public. Adanya situs website mampu menjadi media informasi komunikasi dan transaksi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dengan mudah di akses menggunakan internet. Sehingga menghasilkan timbal balik antara keduanya (Sudiro et al., n.d.) Misalnya, administrasi yang berlangsung hanya dalam hitungan jam bisa dengan mudah di alihkan secara cepat melalui sistem online. Sehingga kegiatan administrasi bisa di akses melalui website, facebook, whatsapp dan Instagram.

Pemerintah daerah perlu melakukan kolaborasi, melibatkan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi segala persoalan di wilayah publik (Surya, Nurmiyati, et al., 2021). Sekarang ini, kebutuhan penggunaan e-Gov sendiri mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, pemerintah kabupaten Mahakam ulu di tuntut untuk bisa berkerja keras dan proaktif dalam menangani perkembangan zaman dengan penggunaan teknologi modern. Melihat perkembangan Kabupaten Mahulu sendiri, Merupakan Kabupaten Baru Di Provinsi Kalimantan Timur hasil dari pemekaran dari Kutai Barat yang di sahkan di DPRI pada 14 Desember 2012 , jika di totalkan baru berusia 11 Tahun sejak berpisah dari Kutai Barat. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Mahakam ulu 37.637 jiwa merupakan penduduk dengan usia produktif turut aktif dalam pembangunan penyelenggaraan pemerintahan.

Badan Kepegawaian merupakan organisasi perangkat yang mampu menerapkan sistem e-gov dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Peran

menyediakan , memberikan serta menerbitkan informasi public yang bisa di jalankan secara maksimal. Hanya saja kekurangan yang terjadi di instanti ini adalah di bukanya website BKPSDM pada tahun 2022 baru berjalan selama 2 tahun sehingga selama ini kegiatannya dilakukan secara manual (Bimasakti et al., n.d.) di bawah ini adalah gambar website yang di terbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:

Gambar 1. Website BPSDM Mahakam Ulu



Sumber: <https://bkpsdmmahakamulu.com> , 2024

E-government menjadi solusi yang tepat dalam penyampaian informasi layanan public yang dilakukan secara online. Seperti website di atas yang menunjukkan teknologi informasi dapat mendukung penyelenggara pemerintahan kepada publik dengan harapan memudahkan, kenyamanan transparansi dalam pemberian layanan. Hal yang perlu di garis bawahi (Anna et al., n.d.) E-Government bukan hanya website akan tetapi memiliki fungsi yang sangat luas yang mencakupi segala macam proses dan struktur yang memberikan wadah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui pelayanan elektronik.

Website BPSDM Kabupaten Mahakam Ulu menjadi salah satu media untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, hal ini guna memudahkan pertukaran arus informasi sehingga tak terbatas pada ruang saja. Digitalisasi dewasa ini menjadi sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan di mana salah satu pilar perwujudan pemerintahan yang baik adalah layanan yang berkualitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memaparkan segala peristiwa penelitian yang terjadi di lapangan dengan batuan studi literature. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti sebuah kondisi objek secara alamiah, dimana peneliti ialah sebagai instrument kunci dalam pengumpulan data (Hasan et al., n.d., 2022) dilakukan secara studi literature dengan teknik pengumpulan

data kepustakaan seperti kumpulan jurnal/artiket terkait, dokumen yang relevan dengan bahan kajian penelitian. Kemudian data yang di peroleh peneliti kumpulkan, diorganisir sebagai bahann kajian pustaka (Hadi, 2021) Kemudian peneliti akan menyimpulkan serta menyajikan hal-hal yang nantinya akan berkaitan dengan kajian Pustaka yang berhubungan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menggunakan data primer dan sekunder (Idris et al., 2023) Data primer ini berasal data laporan program BPKSDM Mahakam Ulu Terbaru tahun 2022 sampai 2024. Data sekunder diperoleh langsung dari arsip atau dokumen yang relevan serta keterlibatan pegawai yang berkerja di (BKPSDM) Mahakam Ulu.

Hasil dan Diskusi

Tata Kelola Pemerintahan Berbasis *Electronic Government* di (BKPSDM) Kabupaten Mahakam Ulu

Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Data yang menunjukkan Renstra (BKPSDM) Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Kinerja Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu

No	Indikator Kinerja	Pencapaian					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rasio Jumlah Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan SOTK	50%	60%	70%	75%	80%	
2	Persentase Diklat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan	58%	65%	70%	75%	80%	
3	Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN	85%	75%	70%	60%	50%	
4	Persentase Penempatan ASN yang sesuai Kompetensi	40%	50%	60%	70%	80%	
5	Tersedianya Sistem Kepegawaian daerah berbasis kompetensi pegawai	45%	55%	60%	70%	80%	
6	Berjalanannya Seleksi CPNS	50%	60%	70%	75%	80%	

Sumber: Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun (2021–2016)

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di BKPSDM mengalami pencapaian kinerja yang terus meningkat tiap tahun sehingga meningkatkan upaya penggunaan penggunaan tata Kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan teori e-gov terkait identifikasi target pencapaian pada dasarnya penerapan e-Gov Kabupaten Mahakam mampu mengikuti siklus kemajuan era informasi dan komunikasi. Dan terbuka dalam penerimaan dan penggunaan teknologi dan informasi dan komunikasi dalam

pelayanan public. Berdasarkan kondisi lingkungan BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu, ada 4 hal yang penting untuk bisa di terapkannya e-Gov sebagai berikut : Pertama, Semua kalangan masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi ; Kedua, Kewajiban bagi pemerintah dengan menciptakan pelayanan yang murah dan mudah ; Ketiga, Tidak ada pembeda antara penggunaan administrasi pelayanan manual yang terbatas dengan online ; Keempat, meningkatkan kualitas sistem dokumen dan pelayanan informasi (Mindarti et al., 2023).

Terdapat 3 kriteria yang menjadi pengukuran terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis electronic-government yang di terapkan di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Mahakam Ulu. Ada 3 kriteria itu meliputi Pelayanan Kepada Masyarakat Menuju Pelayanan Oleh Masyarakat, Manual Berbasis Dokumen / Kertas Menuju Pemerintahan Online, dan Kesenjangan Digital Menuju Demokrasi Digital.

Pelayanan Kepada Masyarakat Menuju Pelayanan Oleh Masyarakat (*From Services to Citizens to Service by Citizens*)

Prinsipnya pemerintah wajib mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Bimasakti et al., n.d.). Dalam sektor pemerintahan, memberikan kualitas pelayanan yang optimal menjadi salah satu aspek yang harus di utamakan oleh bagian dalam pelaksanaan birokrasi. Setiap warga memiliki hak atas pelayanan yang wajib terpenuhi, dan pemerintah memiliki kewajiban menyediakan berbagai fasilitas layanan public kepada masyarakat. (Diana et al., 2024) senada dengan memperhatikan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

Visi yaitu membangun mahulu untuk semua sejahtera berkeadilan dan misinya terdiri dari 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan 3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi. 4. Menciptakan tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Kualitas pemerintahan dapat di ukur dari kemampuannya dalam memberikan fasilitas layanan public yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah di tuntutan serius dalam melaksanakan pelayanan public. Oleh sebab itu, karena negara Indonesia yang berkembang menyadari bahwa kebutuhan serta pelayanan public dari aspek efektif, efisien dan kualitas menyesuaikan dengan standar perkembangan zaman teknologi. (Rauf & Andriyani, 2023).

Jika di hubungkan antara pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat memberikan gambaran jelas sebagai contoh yang wajib di tiru untuk BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu dapat ditinjau dari sistem penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adanya evaluasi dalam bentuk

komponen penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), data ini menunjukkan ada 5 komponen yang perlu evaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Tabel 2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Pusat

NO	KOMPONEN	DOKUMEN	SUB KOMPONEN	BOBOT (%)
1	Perencanaan Kinerja	Renstra,	Pemenuhan Renstra	2
			Kualitas Renstra	5
			Implementasi Renstra	3
		Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja	Rencana Kinerja Tahunan	4
			Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	10
			Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	6
2	Pengukuran Kinerja	IKU, Data Kinerja	Pemenuhan Pengukuran	5
			Kualitas Pengukuran	12,5
			Implementasi Pengukuran	7,5
3	Pelaporan Kinerja	LKjIP	Pemenuhan Pelaporan	3
			Penyajian Informasi Kinerja	7,5
			Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,5
4	Evaluasi Internal	Monitoring dan Evaluasi	Pemenuhan Evaluasi	2
			Kualitas Evaluasi	5
			Pemanfaatan Evaluasi	3
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	Realisasi Fisik & Keuangan (target Tercapai), Prestasi, Penghargaan	Kinerja yang dilaporkan (outcome)	15
			Kinerja Lainnya	5
Total				100

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa secara sistem penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mendapatkan Range Nilai 100 yaitu dalam keterangan Sangat Memuaskan. Karena Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan bentuk integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran relevan dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Ini merupakan data yang di buat oleh pemerintah pusat sebagai pacuan untuk pemerintah kabupaten Mahakam Ulu.

Dari hasil penelitian berdasarkan dokumen menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi LKJIP BKPSDM Kab. Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/19/Inspektorat/ ELKjIP/VIII/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 BKPSDM Kab. Mahakam Ulu memiliki beberapa kekurangan yang harus dilakukan peningkatan baik dalam pelaporan maupun kinerja, selain itu terdapat salah satu kekurangan yang digaris bawahi yaitu “BELUM melakukan publikasi dokumen- dokumen SAKIP pada website resmi pemerintah atau media elektronik lainnya”, hal ini menjadi kekurangan yang terus- menerus berlanjut karena belum adanya website BKPSDM Kab. Mahakam Ulu. Data yang di tunjukkan sebagai (SAKIP) BKPSDM Mahakam Ulu Sebagai berikut:

Tabel 3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) BKPSDM Kab. Mahakam Ulu

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	17,69
2	Pengukuran Kinerja	25	11,88
3	Pelaporan Kinerja	15	9,67
4	Evaluasi Internal	10	4,25
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	14,42
	Nilai Hasil Evaluasi	100	57,90
	Kategori Penilaian		CC (CUKUP)

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) BKPSDM Kab. Mahakam Ulu Tahun 2021

Sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, maka sudah menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah memberikan kinerja instansi yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, sehingga melihat dari Analisa Fishbone diatas terdapat beberapa penyebab permasalahan yang menyebabkan Nilai SAKIP BKPSDM Kab. Mahakam Ulu masih rendah sehingga dibutuhkan pemecahan masalah sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Tentu saja hal ini bertentangan dengan penerapan e-governance dengan mengupayakan akutabilitas.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa secara adaptasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu di nilai Cukup dan termasuk tergolong rendah. Kriteria perubahan teknologi yang di contohkan oleh Pemerintaah Pusat belum dapat sepenuhnya di ikuti oleh BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu karena berbagai faktor salah satunya belum terbitnya website SAKIP yang berbasis online. Selain itu, kualitas Sumber Daya Manusia di bagian Aparatur Pemerintahan yang wajib mengikuti pelatihan ataupun seminar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam bentuk website. Agar pendataan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran (Wahyuni et al., n.d., 2022).

Manual Berbasis Dokumen / Kertas Menuju Pemerintahan Online (*From Paper-Based to Government Online*)

Mewujudkan efektif dan efisien di dalam tata kelola pemerintahan, dilakukan adanya pergantian proses konvensional atau di kenal dengan “Paper Based” dengan menerapkan konsep Government Online. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada seluruh kegiatan aktivitas yang menggunakan dokumen kertas semata, akan tetapi dialihkan dalam bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang terhubung dengan internet.

Sayangnya dengan adanya kemajuan teknologi yang modern pada saat ini belum dapat menghilangkan kegiatan yang basisnya masih manual/konvensional di BKPSDM

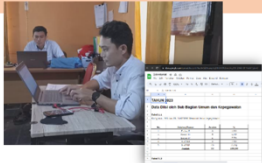
Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga istilah good governance (tata Kelola pemerintahan yang baik) yang terus di gadang-gadangkan oleh pemerintah setempat masih belum terlihat kemajuannya karena masih mempertahankan hal yang lama. Data yang masih bersifat dokumen manual di instansi pemerintahan justru menjadi permasalahan yang sifatnya kompleks sehingga cenderung rumit untuk dapat di akses oleh public terbatas dalam mengaksesnya.

Data laporan hasil penelitian dokumen menunjukkan bahwa kaitan dengan From Paper-Based to Government Online ditandai dengan munculnya terobosan inovasi oleh BKPSDM yaitu mempublikasikan dokumen-dokumen yang sifatnya digital dan bisa di akses oleh public. Sebelumnya pola pengumpulan data kinerja di internal BKPSDM masih menggunakan sistem manual dengan memanfaatkan media Whatsapp untuk membagikan form pengumpulan data kinerja berupa format excel ke bidang-bidang. Perencanaan kemudian di rekap ke dalam laporan kinerja, sehingga kondisi yang terjadi saat formnya sudah di isi pada saat laporan seringkali tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi keterlambatan penyusunan laporan. Secara konsep government online belum ditetapkan secara keseluruhan karena masih ada prosesnya secara manual atau paper based. Adapun gambar di bawah ini upaya yang di lakukan oleh BKPSDM sebagai berikut:

Gambar 3. Tahapan Uji Coba Penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) BKPSDM

1. UJI COBA INPUT DATA KINERJA INTERNAL

Melakukan Uji Coba menggunakan Input Data Kinerja Digital, tabel-tabel yang dibuat secara umum tidak ada permasalahan, semua *google spreadsheet* dapat terkoneksi pada template *google document*.



1. RAPAT EVALUASI

Melaksanakan Rapat Evaluasi untuk melihat kendala-kendala dan mencari solusi bersama dalam pelaksanaan aksi perubahan

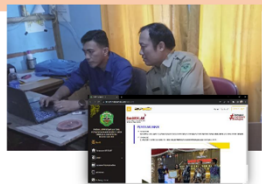
Kendala yang sering dihadapi adalah dalam melaksanakan koordinasi, pihak terkait tidak berada ditempat dan dilakukan penjadwalan ulang.



2. UJI COBA WEBSITE DAN UPLOAD DOKUMEN SAKIP

Melakukan Uji Coba menggunakan melakukan upload Dokumen-dokumen SAKIP pada website BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu yang telah dibangun. Saat diujicoba masih timbul bug sehingga saat input dokumen pada fitur SAKIP data tidak dapat ter baca, pada perbaikan selanjutnya bug sudah dapat teratasi

www.bkpsdmamahakamulu.com



2. PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN PUSAKA SAKIP

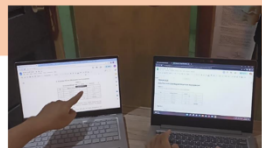
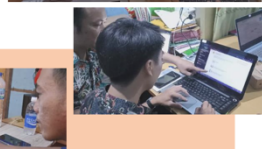
Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan dan Pemanfaatan PUSAKA SAKIP sebagai bentuk komitmen di internal BKPSDM dalam menghimpun dokumen dan data kinerja untuk bahan pelaporan LKIP sebagai upaya meningkatkan nilai SAKIP BKPSDM yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Mahakam Ulu, yang dihadiri oleh Kepala BKPSDM, Sekretaris, Kabid dan Kasubag serta Staf PNS BKPSDM Kab. Mahakam Ulu






3. PENGINPUTAN DATA KINERJA INTERNAL DARI BIDANG-BIDANG DAN UPLOAD SELURUH DOKUMEN SAKIP

Melakukan penginputan data kinerja digital oleh operator/staf di bidang-bidang, pada awal penginputan dilakukan pendampingan kepada staf dalam melakukan login sampai masuk ke dalam tools *google spreadsheet* untuk menginput data kinerja sesuai dengan bidang masing-masing


Sumber: BKPSDM Mahakam Ulu

Gambar di atas menunjukkan bahwa usaha ataupun upaya yang di lakukan oleh BKPSDM yaitu dengan membangun “Pusat Dokumentasi dan Data Kinerja Digital atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan PUSAKA (SAKIP) BKPSDM Kab Mahakam Ulu.” E-Gov yang di diberlakukan berupa media website dan tools berguna untuk pengumpulan data laporan kinerja sebagai bentuk penerapan akutabilitas kinerja instansi yang transparan yaitu mempublikasikan dokumen-dokumen SAKIP seperti RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi yang dengan mudah di akses oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan public.

Penarapan electronic government di BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu berupaya melaksanakan Aksi Perubahan dengan menyediakan media publikasi berupa dokumen-dokumen SAKIP dan menghimpun data kinerja internal dengan menampilkan pelaporan kinerja instansu pemerintahan, untuk mencapai 3 tahap sebagai berikut:

1. Tersajinya Dokumen-Dokumen SAKIP seperti RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi dan dokumen lainnya pada website.
2. Terkumpulnya Data Kinerja Internal yang tepat waktu sebagai bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggunakan tool spreeasheet yang dapat di akses melalui Website.
3. Terbangunnya Website BKPSDM yang menyajikan informasi tentang BKPSDM dan pelayanannya, menyajikan berita-berita terkait kegiatan BKPSDM dan menjadi pusat informasi BKPSDM Kab. Mahakam Ulu dengan fitur publikasi Dokumen-dokumen SAKIP yang dapat di preview dan di download oleh pengguna/publik

Dengan memberlakukan dokumen digital menjadi solusi terbaik dalam penerapan e-gov di BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu. Terlebih lagi, layanan elektronik (melalui pemerintahan digital) secara mendasar mengubah cara pengelolaan proses logistic dalam dinamika perkembangan teknologi. Yang perlu di garis bawahi, layanan elektronik menjadi tantangan yang baik ke depannya bagi masyarakat maupun lembaga sektor public. Pemerintah harus memaksimalkan manfaat dari kemajuan teknologi digital, yang artinya kemajuan dalam teknologi menjadi perubahan maju untuk kabupaten yang sedang berkembang (Asgarkhani, 2005).

Kesenjangan Digital Menuju Demokrasi Digital (*From Digital Discrepancy to Digital Democracy*)

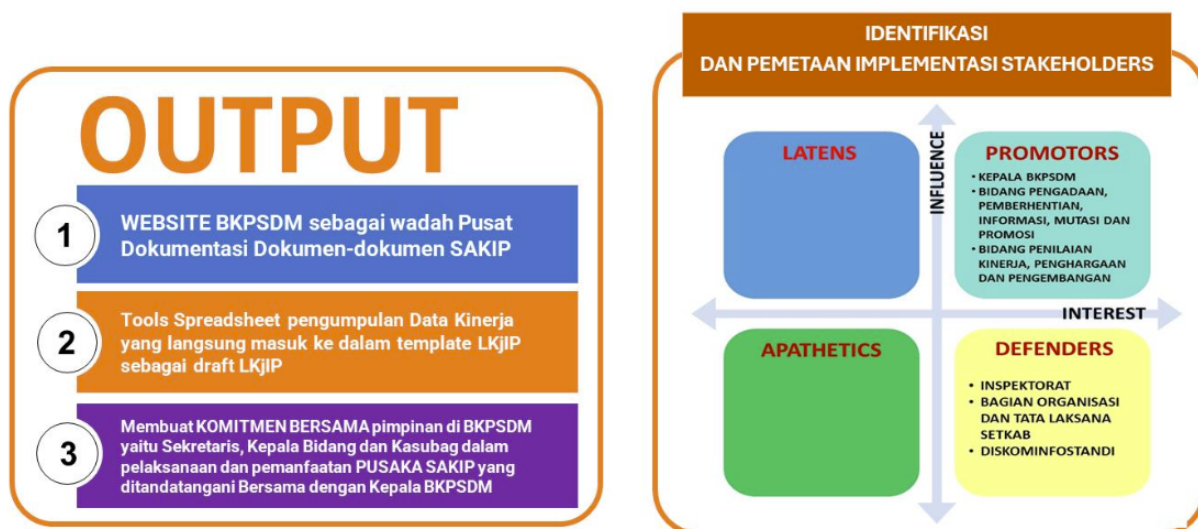
Prinsipnya transformasi terjadi di lingkungan pemerintah dari, oleh dan untuk masyarakat yang merasakan transformasi digital, artinya dibutuhkan pemerataan teknologi informasi. Sistem ini tercipta dengan adanya sistem demokrasi di dalam bernegara sehingga mewujudkan transformasi Kesenjangan Digital Menuju Demokrasi Digital yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dengan masyarakat sebagai stakeholder. Faktor utama yang terjadi karena kesenjangan digital menuju demokrasi digiltal ialah akses penggunaan internet yang masih tergolong rendah di kabupaten Mahakam ulu karena masih mengalami keterbatasan signal. (Del Carmen et al., n.d.) Faktor lainnya yang relevan tingkat transparansi informasi yang dicapai melalui internet

untuk akuntabilitas serta dokumen tambahan. Adapaun perihal kegiatan yang dilakukan BKPSDM terkait sosialisasi SAKIP online sebagai berikut:

1. Persamaan persepsi tentang rencana aksi perubahan PUSAKA SAKIP di BKPSDM Kab. Mahakam Ulu yang menunjang kebutuhan permintaan data dari bagian organisasi Setda dan sebagai dasar Evaluasi dari Inspektorat;
2. Melaksanakan Komitmen Bersama di Internal BKPSDM untuk melaksanakan dan memanfaatkan PUSAKA SAKIP;
3. Bukti nyata keberlanjutan dalam implementasi rencana aksi perubahan ini adalah disetujuinya Usulan Pengembangan Website BKPSDM Kab. Mahakam Ulu dan telah teranggarkan ke dalam APBD tahun 2024

Melakukan Monitoring sebagai upaya keberlanjutan pelaksanaan aksi perubahan. PUSAKA SAKIP merupakan kegiatan yang diharapkan akan terus menerus dan berkelanjutan dalam berbagai aspek, terutama dalam memberikan layanan publikasi dokumen- dokumen SAKIP pada website BKPSDM Kab. Mahakam Ulu, Keberlanjutan Implementasi Aksi Perubahan ini dengan melakukan:

Gambar 4. Hasil Input dan Output Pemetaan Implementasi Website BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu



Sumber : Website BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu

Gambar di atasnya menunjukkan bahwa dengan terbentuk website BKPSDM pada tahun 2022 menjadi sebuah wadah pusat dokumentasi SAKIP digital perdana yang di upayakan akan terus mengalami perkembangan sistem. Sesuai dengan kaidah penerapan e-government dari aspek transparansi yang memudahkan public untuk bisa mengakses website tersebut.

Faktor Pendorong dan Penghambat Penerapan *Electronic Government* di BPKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu

Menurut Grindle adanya keberhasilan kebijakan dapat di ukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes) "implementation as a political and administrative

process”, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin di raih. Pengukuran keberhasilan dapat di ukur dari 2 hal yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Dari 2 hal yang dikemukakan di atas, dapat mengetahui faktor pendorong serta penghambat BPKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu kemudian di elaborasi dengan teori Edwards III, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 2000). Faktor – faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor – faktor tersebut terhadap implementasi kebijakan yang dimaksud. Terkait dengan masalah ini, untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat diterapkannya e-Gov di BKPSDM Kab. Mahulu *melalui* Empat faktor tersebut meliputi komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) (Edward III, 1984).

Faktor Pendorong

Munculnya istilah faktor pendorong kerap di artikan sebagai pendukung serta menumbuhkan suatu ataupun kegiatan yang dilakukan. Kemauan yang besar untuk bisa menyesuaikan kondisi beradaptasi dengan banyak keteringgalan sistem digital. Struktur birokrasi erat kaitanya dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas itu nantinya akan dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, dan pengambilan keputusan mengikuti arahan komando. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

Berdasarkan data laporan dokumen SAKIP menunjukkan bahwa, struktur birokrasi yang diterapkan di BKPSDM Kab. Mahulu dapat dikatakan sigap, cepat dan tanggap terhadap terlaksananya penerapan *e-Gov*. Selain karena di BKPSDM Kab. Mahulu memiliki struktur birokrasi yang ramping, juga karena memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas. Masing-masing seksi yang berada dibawah kepala bidang memiliki tupoksi dan rincian tugas tersendiri.

Sehubungan dengan Pengembangan Potensi Diri, maka perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang memahami tentang tugas pokok dan fungsi pada diri sendiri, selain itu motivasi dari pimpinan atau atasan langsung juga sangat berperan penting dalam rangka menggali potensi diri. berikut langkah langkah pengembangan kompetensi diri, Adapun kegiatan yang diupayakan untuk menunjang keterlaksanaanya e-government yaitu:

1. Memohon arahan terkait bimbingan dalam rangka saran dan masukan dari Kepala BKPSDM Mahakam Ulu.

2. Melaksanakan bimbingan dan arahan terhadap bawahan/staf terutama tim implementasi aksi perubahan
3. Mendapatkan masukan dan saran dari stakeholders terhadap implementasi aksi perubahan.
4. Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepegawaian Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Aplikasi E- Kinerja sebagai Tim Pendamping dalam menunjang kapasitas Sumber Daya Manusia jabatan Pengawas.

Dalam rangka pemenuhan pengembangan kompetensi tim kerja adalah dengan memberikan bimbingan dan arahan serta lewat pelatihan mandiri lewat pembelajaran online melalui youtube dan artikel tips praktis terkait pengembangan dan desain website:

Gambar 5. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Potensi Diri



Sumber : https://youtu.be/D8fD6S300_0?si=y7fHJNqND3c2MnPI

Dari hasil video dokumentasi diatas, di BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu memiliki spesialisasi dalam tim Pusat Dokumentasi dan Kinerja Digital sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (PUSAKA SAKIP). Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan internal dalam pengumpulan data, sehingga hal ini mendorong dengan kaidah penerapan e-government.

Faktor Penghambat

Berbeda dengan faktor pendorong, istilah dari faktor penghambat merupakan kebalikannya. Faktor penghambat ialah kondisi yang menghambat suatu usaha kegiatan yang dilakukan. Ada 3 faktor yang menghambat keberhasilan dalam penerapan e-government yaitu, komunikasi, sumber dan disposisi.

Ditinjau dari aspek komunikasi, masih di nilai cenderung lambat karena sebelumnya masih menggunakan basis manual dan baru beranjak ke era digital atau di kenal e-gov

itu baru di mulai pada tahun lalu 2023. Tentu saja sering lambat melaksanakan laporan ke pusat secara efektif dan efisien.

Di tinjau dari aspek sumber daya yang analisis melalui fisbone diatas telah tergambar beberapa penyebab masalah yang terjadi yaitu:

1. Sumber daya manusia; pemahaman mengenai sakip belum memadai, sdm penyusun laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) masih rendah
2. Metode kerja; sop atau pola pengumpulan data kinerja belum berjalan baik, membutuhkan waktu yang lama dalam menghasilkan data kinerja setiap bidang
3. Material; data kinerja yang lambat terkumpul, data masih ada yang tidak valid
4. Tools/alat: belum ada alat bantu dalam pengumpulan data sakip, belum ada media digital mempublikasikan dokumen sakip

Dari 4 analisis permasalahan di atas, hal tersebut tidak optimal dalam penerapan e-government di BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu. Terakhir dari aspek disposisi, keinginan ataupun kemauan para pelaku kebijakan dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, dari BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu seharusnya ingin melakukan kebijakan, ataupun kemauan yang besar untuk bisa terus survive mengembangkan e-government.

Hasil data penelitian dokumen menunjukkan, faktor disposisi yang di hubungkan dengan sumber daya manusia masih mengalami kesulitan dalam memahami SAKIP sehingga kinerja laporan sering mengalami keterlambatan sehingga tidak dapat memenuhi target tujuan. Selain itu, Pegawai (SDA) yang kurang survive ini menjadi faktor penting yang bisa menghambat penerapan e-government. Jika mengubungkan dengan perlunya transparansi penegakkan hukum tentu saja faktor penghambat bertentangan dengan hukum.

Kesimpulan

Pemanfaatan e-governement upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah khususnya di Badan Kepegawain Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun poin-poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kepada Masyarakat Menuju Pelayanan Oleh Masyarakat dari basis kinerja mahakam ulu dari range tahun mengalami peningkatan akan tetapi sayangnya secara adaptasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu di nilai cukup dan termasuk tergolong rendah.
2. Manual Dokumen Menuju Pemerintahan Online, upaya yang di lakukan oleh BKPSDM yaitu dengan membangun "Pusat Dokumentasi dan Data Kinerja Digital atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan PUSAKA (SAKIP) BKPSDM Kab Mahakam Ulu."
3. Pengembangan Potensi Diri, maka perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang memahami tentang tugas pokok dan fungsi pada diri sendiri, selain itu motivasi dari pimpinan atau atasan langsung juga sangat berperan penting dalam rangka menggali potensi diri.

4. Kinerja laporan sering mengalami keterlambatan sehingga tidak dapat memenuhi target tujuan. Selain itu, Pegawai (SDA) yang kurang survive ini menjadi faktor penting yang bisa menghambat penerapan e-government.

Adapun yang perlu terus di evaluasi ialah Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi di BKPSDM Kab Mahakam Ulu untuk terus mengupayakan komunikasi yang efektif terhadap pelaksana yang memiliki komitmen dalam bekerja menjalankan tugas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku terutama dalam penerapan electronic-government.

Referensi

- Agus Diana, B., Sunarya, A., & Harta, R. (2024). Kajian Pelaksanaan E-Government pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya181>
- Asgarkhani, M. (2005). The Effectiveness of e-Service in Local Government: A Case Study. In *The Electronic Journal of e-Government* (Vol. 3). www.ejeg.com
- Atul, R. ', Wahab, A., Arsyad,), Pengkajian, B., Komunikasi, P., Manado, I., & Pomorow, J. (2015). Studi Implementasi E-Government di Daerah Perbatasan The Study of E-Government Implementation in Border Area. In *Jurnal Pekommas* (Vol. 18, Issue 1).
- Bimasakti, F., Jurusan,), & Pemerintahan, I. (n.d.). *TATAKELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang)*.
- Cahyawan, R. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Negara*, 4(4), 5119–5133.
- Del Carmen, M., Pérez, C., Pedro, M., Bolívar, R., López, A. M., María, H., Carmen, D., Perez, C., & López Hernández, A. M. (n.d.). *THE DETERMINANTS OF GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS ONLINE*.
- Edward III, G. C. (1984). Public Policy Implementing. *Literary and Linguistic Computing*.
- Esty, D. C. (1490). Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Administrative Law. In J.
- Fahlevy, M. R., Saleh, M. H., & Nurmiyati, N. (2023). Eksistensi Birokrasi di Era Revolusi 4.0: Penggunaan Electronic Government dalam Optimalisasi Pelayanan. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 42–57. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.45>
- Haerofiatna, H., & Chaidir, J. (2023). Electronic-based Governance System Risk Management in Serang District. *International Journal of Business and Management Review*, 11(5), 57–66. <https://doi.org/10.37745/ijbmr.2013/vol11n55766>
- Hasan, M., Tuti Khairani Harahap, Mp., Syahrial Hasibuan, Ms., Iesyah Rodliyah, M., Sitti Zuhaerah Thalbah, Mp., Cecep Ucu Rakhman, Mp., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, M., Inanna, Mh., Andi Aris Mattunruang, Mp. S., Nursaeni, Mp., Yusriani, Mp., Nahriana, Mk., Dumaris Silalahi, Mp. E., Dra Sitti Hajerah Hasyim,

- Mp., Azwar Rahmat, Ms., Yetty Faridatul Ulfah, Mtp., & Nur Arisah, Mh. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Idris, A. S., Syaifuddin, T. I., Effendi, S. N., Alaydrus, A., Idris, A., & B, J. (2023). *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Goals: How the Mining Industry Supports Quality Education in Paser Regency* (pp. 30-44). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-194-4_4
- Surya, I., Nofrima, S., Arie, S. H., & Nurmiyati, N. (2021). Collaborative governance dalam pengelolaan wisata berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 191-197. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v6i2.4948>
- Surya, I., Nurmiyati, N., Suranto, S., & Hasanah, N. (2021). Analysis of The Implementation of Smart Governance through Twitter in Local Governments in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 11(2), 169-184. <https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5596>
- Ishwara Bhat, P. (n.d.). *THE COMMAND AND CONTROL MODEL FOR GOOD GOVERNANCE OF PUBLIC TRUSTS-AN EVALUATION OF THE BOMBAY TYPE OF REGULATORY REGIME 1*. <http://www.britannica.com/>
- Marilee S. Grindle. (2000). *Politics and Policy Implementation in The Third World World* (New Jersey: Princeton University Press, 1980). In *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara.
- Mindarti, L. I., Galih, A. P., & Wahyudi, L. E. (2023). Analisis implementasi keterbukaan informasi publik berbasis electronic government di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 83-92. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.991>
- Nanang Faisol Hadi. (2021). *Literature Review is A Part of Research*. 1(3). <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sedujhttp://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj>
- Putu Han Widiatmika, G. S. D. (n.d.). *Good Corporate Governance, Job Motivation, and Organization Culture Which Impact Company Financial Performance*.
- Rauf, A., & Andriyani, D. (2023). Analisis Implementasi Good Governance terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 99-108. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1850>
- Rohaeti, Y. (2023). *Analysis of E-Government Implementation on Organizational Performance* (pp. 172-182). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-146-3_18
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governane dan Good Coorporate*. PT. Bumi Aksara.
- Septiani, E. (n.d.). *IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN SMART CITY* (Vol. 3, Issue 3).
- Sudiro, A. P., Irawan, B., Indarto, K., Muara, J. L., Kampus, M., Kelua, G., & 75115, S. (n.d.). *Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Situs Web Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Mahakam Ulu*. <https://covid19.mahakamulukab.go.id/Tiris>
- Sudrartono, Y. L. R. A. D. C. F. W. W. K. M. O. R. K. L., Sudrartono, T., Listianti, Y., Aditiarno, R., Fatihah, D. C., Warsiati, W., Martowinangun, K., Rachman, O., Legistari, K., Studi, P., Akuntansi, K., Piksi Ganesha, P., Kantor, A., Keuangan, D., & Ganesha, P. (2023). *Tata Kelola Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Digitalisasi*

Hasil Pertanian dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk di Kecamatan Cikancung. 1, 35-41.

Variant Anna, N. E., Puspitasari, D., Fitriyah Mannan, E., & Fitri Mutia, dan. (n.d.). *Evaluation of Provincial Capital E-Government Websites in Indonesia.* www.kendarikota.go.id

Wahyuni, A., Ketut Gunawan, I., & Barlian, J. (n.d.). ADAPTASI INOVASI GO-DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19: (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda). *Jurnal MODERAT*, 8(2).

Undang- Undang :

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Melalui Pengembangan E-Gov

Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan

Dokumen :

James Agustian. 2023. Laporan Aksi Perubahan (PUSAKA SAKIP) Pusat Dokumentasi dan Data Kinerja Digital Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 Tahun 2023 : PUSLATBANG KDOD LAN RI

Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikam dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026